

Mualemnomics

Teuku Kemal Fasya

Kata di judul di atas mengingatkan saya kepada model pembangunan Orde Baru awal: Widjojonomics. Widjojonomics menjadi istilah baku yang masuk dalam kajian ekonomi tentang desain pembangunan Indonesia pasca-Orde Lama; sebuah model kapitalisme yang dikembangkan Soeharto pada akhir 60-an dan mencapai puncaknya pada era 80-an serta dipuji sebagai satu dari keajaiban Asia (*one of Asian miracles*).

Istilah Widjojonomics merujuk kepada pemikiran pembangunan ekonomi berbasis pada optimalisasi kinerja BUMN, defisit pembiayaan melalui utang luar negeri, liberalisasi perbankan, dan konglomerasi industri, dengan tidak melupakan sektor pertanian sebagai negara berkembang (Martin Manurung, 2007).

Mazhab ekonomi itu digawangi para lulusan University of California at Berkeley. Otaknya adalah Prof. Widjojo Nitisastro, mantan dekan Fakultas Ekonomi UI. Ia menyertakan para kolega dan muridnya seperti Prof. Emil Salim, Prof. Sadli, Prof. Ali Wardhana, Prof. J.B Sumarlin, dan Prof. Dorodjatun Koentjoro-Jakti untuk mengisi pos menteri dan lembaga strategis ekonomi nasional. Di generasi lebih junior muncul sosok Dr. Sri Mulyani dan Dr. Marie Elka Pangestu.

Meskipun banyak kritik atas desain ekonomi *gank* Berkeley, mazhab neolib khas Amerika itu tak lekang dan masih membasahi model pembangunan Indonesia pasca-reformasi. Setelah itu sempat muncul istilah Habibinomics yang berorientasi pada pembangunan kedirgantaraan tapi tidak semasygul istilah Widjojonomics.

The Great Mualem

Permasalahannya, keduanya tidak identik, “apel dengan apel”, antara desain pembangunan Prof. Widjojo Nitisastro dengan konsep pembangunan Aceh pasca 2017 yang dimitiskan akan dipimpin oleh Muzakkir Manaf alias Mualem, yang kemudian saya sebut Mualemnomics.

Mazhab Widjojonomics, sekeras apapun kritik atas desain pembangunan itu, pernah menjadi sejarah pembangunan Indonesia. Matra pembangunan neoliberalisme itu berada pada waktu yang tepat menurut kebangkrutan diktatorisme Soekarno yang sosialis(-komunistik). Dengan konsep itu, Indonesia menjadi negara swasembada beras, palawija seperti kedelai, kentang, dan ubi serta bawang putih dan bawang merah. *Booming* migas dan penemuan sumber mineral raksasa lain ikut menggembungkan kesejahteraan masyarakat dan menstabilkan ekonomi Orde Baru.

Mualem sendiri? Ingatan kita pada visi kampanye Zaini Abdullah – Muakkir Manaf yang disebut “21 Janji Zikir” pada Pilkada 2012 sebenarnya bukan konsep ilmiah. Semantiknya seperti ingin menuju Habibienomics, tapi tidak melewati tahapan dan metode yang benar, bahkan fase Widjojonomics pun tidak. Frasa “menjadikan Aceh layaknya Brunei Darussalam dan Singapore” adalah “goyang lidah” yang tidak pernah punya jejak praksis keilmiah.

Bahkan beberapa “janji rasional pun” gagal total. Beberapa indikator sudah memperlihatkan degradasi, seperti tidak Bergeraknya sektor ekonomi riil, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang melonjak (17,11 persen dan 9,93 persen per September dan Agustus 2015, BPS), krisis ekologis yang ditandai silih-ganti bencana dan kegagalan panen, dan perencanaan pembangunan infrastruktur yang tidak padu dan sewenang-wenang.

Adapun besaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Aceh pada 2016 sebesar Rp. 47 triliun disambut dingin karena belum muncul program populis dan rasional-konstruktif. Yang menonjol malah dana aspirasi DPRD sebesar Rp. 885 M (*Serambi*, 11 Januari). Lagi pula bagaimana mengharapkan terobosan jika rangkaian pembangunan sebelumnya (seperti tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM) telah centang-perenang. Janji tiap desa akan mendapat Rp. 500 juta (*Serambi*, 19 Desember 2015) hanya akan sebulus “21 Janji”, karena jika melihat berdasarkan UU Desa (UU No. 6/2014) dan turunannya (PP No. 43/2014, PP No. 47/2015, PP No. 22/2015) tidak semua desa akan mendapatkan anggaran yang sama rasa-sama rata, harus berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Namun, di tengah kegagalan itu, figur Mualem masih terlihat paling terdepan akan mengawal pembangunan Aceh 2017-2022. Beberapa nama lain seperti Irwandi Yusuf, Zakaria Saman, Ahmad Farhan Hamid, Hasbi Abdulah, bahkan Zaini Abdullah yang pada 2017 berumur sangat uzur: 77 tahun, masih kalah populer. Beberapa kandidat terlihat sudah *out of time* atau para oportunist belaka. Terkait popularitas Mualem, kita tidak tahu apakah itu cukup riil atau terdongkrak oleh komunikasi publik kompleks, sekomples “radio bergigi” dan *peumaop* “entah dari mana oleh siapa”.

Pertanyaannya, sedemikian digdayanya Mualem sehingga publik Aceh harus pasrah pada sosok yang secara *das Sein* tidak memiliki pola dan perencanaan pembangunan?

Kosongnya Kelas Menengah

Pertanyaan itu tidak tepat ditanyakan kepada semua publik Aceh. Rata-rata masyarakat Aceh tinggal di pedesaan-pedalaman, kurang melek informasi dan pendidikan. Sebagian besar mereka terindikasi seperti indikator provinsinya; kemiskinannya terburuk kedua se-Sumatera atau ketujuh se-Indonesia. Kemiskinan publik Aceh terentang cukup luas, dari miskin nutrisi, pendidikan, kesehatan, hingga kebahagiaan-pelancongan. Bahkan juga bisa ditambahkan: miskin keberanian!

Pertanyaan di atas layak dimunculkan kepada kelas menengah Aceh yang jumlahnya sekitar 10 persen, yaitu kelas menengah intelektual, sosial, ekonomi, birokrasi, teknokrasi, dan agama. Di tempat lain kelas menengah menjadi sang pendobrak, karena ikut memberikan andil pada arah pembangunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Seperti namanya, kelas menengah memang berada di tengah batas politik-ekonomi-kultural pada pola relasi negara-masyarakat (*civil-state relationship*). Mereka bisa menjadi perantara harapan atau ignoransi akar-rumput dan mengontrol-kritik egoisme-keserakahan elite.

Pertanyaannya, bisa tidak kelas menengah Aceh memikirkan hal ini lebih serius, lebih dalam dan berpeluh demi kebaikan Aceh ke depan? Kelas menengah harus menghindari pertengkaran kekanak-kanakan, melupakan dan tidak boleh dendam atas kegagalan pembangunan Aceh selama ini karena kosongnya figur pemimpin yang bisa menawarkan pembangunan terintegrasi-berkelanjutan pasca-Perdamaian Aceh 2005. Harus dipilih dua-tiga di antara para

elite atau kelas menengah untuk mengambil peran sebagai calon gubernur Aceh. Mereka haruslah yang memiliki visi dan integritas kuat, intelektualitas cemerlang, dan rohani yang gembira.

Karena, jikapun Mualem maju dan menang dalam Pilkada 2017, sepenuhnya sah dan demokratis (?) secara prosedural. Tiap warga yang tidak sedang dicabut hak dan memenuhi syarat, dapat maju sebagai kepala daerah. Tidak boleh ada diskriminasi oleh sesiapa pun. Namun, jangan tanyakan apa yang ditawarkan dalam pembangunan ala Mualemnomics karena kita sudah punya informasi tentang kapasitas dan jejak-rekamnya. Bahkan sebenarnya tidak ada visi Mualemnomics kecuali sebuah impresario kompleks yang berbasis komunikasi populer dan kharismatisme-spartan, yang umum ditemui dalam masyarakat politik tribal-tradisional.

Jangan kutuk siapa-siapa jika Mualem menang ya? Karena yang patut dipersalahkan kaum kelas menengah yang tidak bergerak, berubah, dan menggugah publik. Asik menikmati zona nyamannya hingga hayat dikandung badan.

Teuku Kemal Fasya dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Serambi Indonesia, 18 Januari 2016.